



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN 2022 AUDITED

SEKRETARIAT BNSP

Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan

Telp. (021) 7992685 Fax. (021)7992321

Website: www.bnsp.go.id



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Laman : <http://www.bnsp.go.id>

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelola keuangan negara pada Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 28 April 2023
Kepala Sekretariat,

Fauziah, S.E., M.Si
NIP 19641208 198603 2 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	11
B.1 Pendapatan	
B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	16
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Persediaan	
C.3 Peralatan dan Mesin	
C.4 Gedung dan Bangunan	
C.5 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.7 Aset Tak Berwujud	
C.8 Aset Lain-lain	
C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.10 Uang Muka dari KPPN	
C.11 Ekuitas	
C.12 Pelaksanaan Program Prioritas Nasional	
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	21
D.1 Pendapatan Perpajakan	
D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.3 Beban Pegawai	
D.4 Beban Persediaan	
D.5 Beban Barang dan Jasa	
D.6 Beban Pemeliharaan	
D.7 Beban Perjalanan Dinas	
D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.9 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	26
E.1 Ekuitas Awal	
E.2 Surplus (Defisit) LO	
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5 Transaksi Antar Entitas	

E.6 Ekuitas Akhir

F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas

28

VI. Lampiran dan Daftar



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7992685
Laman : <http://www.bnsp.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jakarta, 28 April 2023
Kepala Sekretariat,


Fauziah, S.E., M.Si
NIP 19641208 198603 2 001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp995.112.126 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp995.112.126 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp93.005.517.074 atau mencapai 94,10 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp98.838.500.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp44.757.658.778 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp647.712.350; Aset Tetap (neto) sebesar Rp43.352.553.345 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp757.393.083.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp247.910.823 dan Rp44.509.747.955

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp94.884.420.541 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-94.884.420.541, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.091.737.626 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-93.792.682.915.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp46.389.345.172, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-93.792.682.915 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp-97.319.250 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 92.010.404.948 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp44.509.747.955.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

U R A I A N	Catatan	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	995.112.126	-	585.268.850
JUMLAH PENDAPATAN		-	995.112.126	-	585.268.850
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	8.889.810.000	8.394.808.194	94,43	8.029.686.854
Belanja Barang	B.2.2	87.268.690.000	81.936.950.480	93,89	71.901.895.132
Belanja Modal	B.2.3	2.680.000.000	2.673.758.400	99,76	6.073.247.900
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		98.838.500.000	93.005.517.074	94,10	86.004.829.886

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

U R A I A N	Catatan	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	247.910.823	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	-	-
Persediaan	C.4	399.801.527	1.056.648.236
Persediaan yang Belum Diregister	C.5	-	-
Jumlah Aset Lancar		647.712.350	1.056.648.236
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.21	-	-
Tanah Belum Diregister	C.22	-	-
Peralatan dan Mesin	C.23	15.257.733.873	13.672.732.293
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.24	-	-
Gedung dan Bangunan	C.25	38.333.391.500	38.333.391.500
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.26	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.27	692.456.000	692.456.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.28	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.29	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.30	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.31	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.32	(10.931.028.028)	(7.867.001.607)
Jumlah Aset Tetap		43.352.553.345	44.831.578.186
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.33	-	-
Aset Tak Berwujud	C.34	2.386.857.000	1.206.150.000
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.35	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.36	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.37	-	-

Aset Lain-lain	C.38	1.620.552.540	1.918.751.540
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.39	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.40	(3.250.016.457)	(2.623.782.790)
Jumlah Aset Lainnya		757.393.083	501.118.750
JUMLAH ASET		44.757.658.778	46.389.345.172
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.41	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.42	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.43	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.44	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.45	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.46	247.910.823	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.47	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		247.910.823	-
JUMLAH KEWAJIBAN		247.910.823	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.48	44.509.747.955	46.389.345.172
JUMLAH EKUITAS		44.509.747.955	46.389.345.172
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		44.757.658.778	46.389.345.172

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	46.389.345.172	43.762.918.453
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(93.792.682.915)	(83.697.158.883)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(97.319.250)	(247.189.720)
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	(96.625.500)	(270.780.000)
Jumlah		(693.750)	23.590.280
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	92.010.404.948	86.570.775.322
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.879.597.217)	2.626.426.719
EKUITAS AKHIR	E.6	44.509.747.955	46.389.345.172

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Entitas berkedudukan di Jl. MT. Haryono Kav. 52. Untuk mewujudkan tujuan di atas, Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi melakukan beberapa langkah-langkah strategis berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada K/L.
2. Membina secara efektif K/L dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi.
3. Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Satuan Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar Pengukuran yang diterapkan pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi dalam penyusunan dan penyajian laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;

- a. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu
- b. sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo.	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo.	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN.	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	Anggaran Awal 2022	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	9.616.480.000	8.889.810.000
Belanja Barang	91.726.370.000	87.268.690.000
Belanja Modal	5.167.714.000	2.680.000.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	106.510.564.000	98.838.500.000

Realisasi
Pendapatan
Rp995.112.126

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp995.112.126 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp995.112.126. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	995.112.126	-
Jumlah	-	995.112.126	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 70,03 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	995.112.126	585.268.850	70,03
Jumlah	995.112.126	585.268.850	70,03

Realisasi
Pendapatan
Rp995.112.126

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp995.112.126 dan Rp585.268.850. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 70,03 dari TA 2021 dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu di tahun 2022 meningkat drastis. Rincian PNPB adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	995.112.126	585.268.850	70,03
Jumlah	995.112.126	585.268.850	70,03

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	14.555.555	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	135.946.178	32.999.999	311,96
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.500.198	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	843.110.195	336.970.500	150,2
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	215.298.351	(100)
Jumlah	995.112.126	585.268.850	70,03

Realisasi Belanja
Rp93.005.517.074

B.2 Belanja

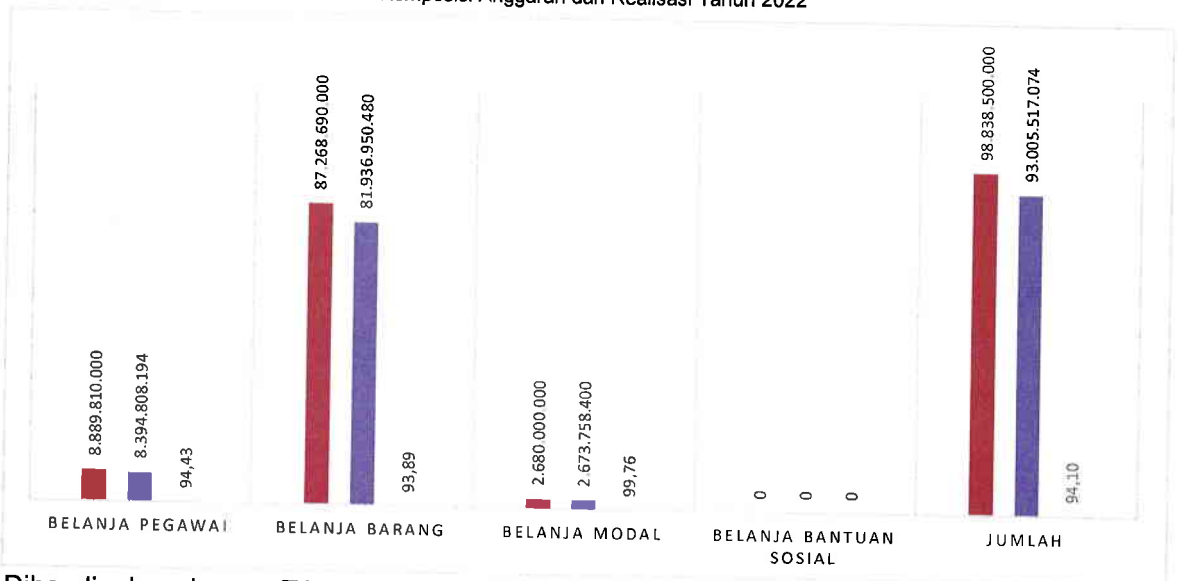
Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp93.005.517.074 atau 94,10 % dari anggaran belanja sebesar Rp98.838.500.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2022

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	8.889.810.000	8.394.808.194	94,43
Belanja Barang	87.268.690.000	81.936.950.480	93,89
Belanja Modal	2.680.000.000	2.673.758.400	99,76
Belanja Bantuan Sosial	0	-	0
Jumlah	98.838.500.000	93.005.517.074	94,10

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2022



Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 8,14% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2022 dan TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Pegawai	8.394.808.194	8.029.686.854	4,55
Belanja Barang	81.936.950.480	71.901.895.132	13,96
Belanja Modal	2.673.758.400	6.073.247.900	(55,97)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	93.005.517.074	86.004.829.886	8,14

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp8.394.808.194

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing masing sebesar Rp8.394.808.194 dan Rp8.029.686.854. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,55 % dari TA 2021. Hal ini disebabkan karena adanya Kenaikan Gaji Berkala Pegawai, adanya pegawai pensiun dan pegawai mutasi antar satker.

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2.300.140.120	2.287.606.760	0,55
Belanja Pembulatan Gaji PNS	41.507	39.520	5,03
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	142.568.812	134.859.666	5,72
Belanja Tunj. Anak PNS	34.140.456	34.869.838	(2,09)
Belanja Tunj. Struktural PNS	46.760.000	69.270.000	(32,50)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	145.044.000	163.014.000	(11,02)
Belanja Tunj. PPh PNS	10.034.219	10.404.043	(3,55)
Belanja Tunj. Beras PNS	114.278.760	116.306.520	(1,74)
Belanja Uang Makan PNS	272.790.000	372.498.000	(26,77)
Belanja Tunjangan Umum PNS	95.560.000	95.015.000	0,57
Belanja Uang Lembur	4.901.000	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2.441.670.140	2.303.794.942	5,98
Belanja Uang Honor Tetap	2.786.881.650	2.458.797.000	-
Jumlah Belanja kotor	8.394.810.664	8.046.475.289	4,33
Pengembalian Belanja Pegawai	2.470	16.788.435	(99,99)
Jumlah Belanja	8.394.808.194	8.029.686.854	4,55

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp81.936.950.480 dan Rp71.901.895.132. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 13,96% dari Realisasi TA 2021. Kenaikan belanja barang TA 2022 dikarenakan adanya Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Barang Operasional	3.884.478.328	3.452.081.012	12,53
Belanja Barang Non Operasional	39.858.176.026	38.407.508.730	3,78
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.209.505.111	1.967.177.002	164,82
Belanja Jasa	14.373.347.562	14.997.930.273	(4,16)
Belanja Pemeliharaan	1.667.941.132	1.157.102.833	44,15
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	16.236.593.320	11.963.603.282	35,72
Belanja Perjalanan Luar Negeri	706.909.001	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	81.936.950.480	71.945.403.132	13,89
Pengembalian Belanja	-	43.508.000	(100,00)
Jumlah Belanja	81.936.950.480	71.901.895.132	13,96

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp438.850.000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp366.055.920 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2022

Uraian	Anggaran	Anggaran	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	216.000.000	216.000.000	215.810.370	99,91
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	222.850.000	222.850.000	150.245.550	67,42
Jumlah Belanja	438.850.000	438.850.000	366.055.920	83,41

Realisasi Belanja
Modal
Rp2.673.758.400

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.673.758.400 dan Rp6.073.247.900. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.493.051.400	6.073.247.900	(75,42)
Belanja Modal Lainnya	1.180.707.000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.673.758.400	6.073.247.900	(55,97)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	2.673.758.400	6.073.247.900	(55,97)

Realisasi Belanja
Modal Peralatan dan
Mesin
Rp1.493.051.400

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.493.051.400 dan Rp6.073.247.900, mengalami penurunan sebesar 75,42% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.493.051.400	6.073.247.900	(75,42)
Jumlah Belanja Kotor	1.493.051.400	6.073.247.900	(75,42)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.493.051.400	6.073.247.900	(75,42)

Penjelasan:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Mutasi Masuk:

Pembelian Peralatan dan Mesin

Definitif aset tak berwujud

Mutasi Keluar:

Penghapusan BMN berupa barang-barang inventaris kantor

Realisasi Belanja
Modal Lainnya
Rp1.180.707.000

B.2.3.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.180.707.000 dan Rp0, mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan realisasi TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Lainnya Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Lainnya	1.180.707.000	-	100,00
Jumlah Belanja Kotor	1.180.707.000	-	100,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.180.707.000	-	100,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.247.910.823 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Rekening BRI	-	-
di brankas	247.910.823	-
yang sudah bentuk kuitansi	-	-
Jumlah	247.910.823	-

Penjelasan Kas di Bendahara Pengeluaran:

Kas di Bendahara pengeluaran sebesar Rp. 247.910.823 dan telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 6 Januari 2023. Dengan NTPN: DD0880JSRC3BVGVO

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp399.801.527 dan Rp1.056.648.236. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

Jenis	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021
Barang Konsumsi	399.066.707	1.056.648.236
Bahan untuk Pemeliharaan	734.820	-
Jumlah	399.801.527	1.056.648.236

Penjelasan Persediaan:

Persediaan bahan untuk pemeliharaan berupa Fogging Liquid 5L Rp734.820,-

C.3 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp15.257.733.873 dan Rp13.672.732.293. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2022	
Mutasi Tambah:	
Pembelian	1.589.676.900
Reklasifikasi Masuk	158.550.180
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Keluar	-163.225.500
Saldo Per 31 Desember 2022	1.585.001.580
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-7.957.540.843
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-6.372.539.263

Penjelasan tentang Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin:

1. LCD Projector/Infocus 1 unit Rp7.400.000,-
2. Televisi 5 Unit Rp365.803.000,-
3. Backet Standing Peralatan 3 Unit Rp6.493.500,-
4. Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 Unit Rp8.580.000
5. Camera Conference 2 Unit Rp62.200.000,-
6. PC Unit 31 Rp732.090.000
7. Laptop 2 Unit Rp50.000.000,-
8. Monitor 16 Unit Rp62.400.000
9. Printer (Peralatan Personal Komputer) 21 Unit Rp131.484.900,-
10. External/Portable Hardisk 30 Unit Rp66.000.000
11. Server 1 Unit Rp96.625.000

Mutasi Tambah - Reklasifikasi Masuk

1. Personal Komputer Lainnya 30 unit Rp66.600.000,-
2. Air Purifier 6 unit Rp44.455.500,-
3. Mesin Penghisap Debu 2 unit Rp7.176.150,-
4. Mesin Penghisap Debu 3 unit Rp12.870.450,-
5. Mesin Fogging 1 unit Rp4.395.600,-
6. UV Sterilizer 4 unit Rp23.052.480,-

Mutasi Kurang - Reklafisikasi Keluar

1. External/Portable Hardisk 30 unit Rp66.600.000,-
2. Server 1 Unit Rp96.625.500,-

Peralatan dan Mesin
Rp38.333.391.500

C.4 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp38.333.391.500 dan Rp38.333.391.500. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2022	38.333.391.500
Mutasi Tambah:	-
Mutasi Kurang:	-
Saldo Per 31 Desember 2022	38.333.391.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(2.930.208.684)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	35.403.182.816

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp692.456.000

C.5 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp692.456.000 dan Rp692.456.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2022	692.456.000
Mutasi Tambah:	-
Mutasi Kurang:	-
Saldo Per 31 Desember 2022	692.456.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(34.622.800)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	657.833.200

C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp10.931.028.028,- dan Rp7.867.001.607. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	15.257.733.873	(7.957.540.843)	7.300.193.030
2	Gedung dan Bangunan	38.333.391.500	(2.930.208.684)	35.403.182.816
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	692.456.000	(43.278.501)	649.177.499
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		54.283.581.373	-10.931.028.028	43.352.553.345

Aset Tak Berwujud
Rp2.386.857.000

C.7 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp2.386.857.000 dan Rp1.206.150.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi berupa Software Komputer. Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2022	1.206.150.000
Mutasi tambah:	
Software Komputer	1.180.707.000
Mutasi Kurang:	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2022	2.386.857.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	(1.629.463.917)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	757.393.083

Penjelasan Aset Tak Berwujud:

Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan NUP 1 Rp. 96.625.500,-
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan NUP 2 Rp. 433.632.600,-
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan NUP 3 Rp. 650.448.900,-
Menjadi Software Komputer Rp. 1.180.707.000,-

Aset Lain-lain
Rp1.620.552.540

C.8 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp1.620.552.540 dan Rp1.918.751.540. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2022	1.918.751.540
Mutasi tambah:	-
Mutasi Kurang:	
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(298.199.000)
Saldo per 31 Desember 2022	1.620.552.540
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1.620.552.540

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp3.250.016.457 dan Rp2.623.782.790. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	2.386.857.000	(1.629.463.917)	1.514.786.167
Aset Lain-lain	1.620.552.540	(1.620.552.540)	-
Total	4.007.409.540	(3.250.016.457)	1.514.786.167

C.10 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp247.910.823 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	247.910.823
Total	247.910.823

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN:

Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan tambahan uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif dan sudah disetorkan ke kas negara.

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp44.509.747.955 dan Rp46.389.345.172. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C.12 Pelaksanaan Program Prioritas Nasional

Pelaksanaannya diantaranya melalui 4 (empat) Program Prioritas Nasional yang terdapat pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Nasional Serifikasi Profesi dengan Pagu mencapai Rp78.324.580.000 dan realisasi sebesar Rp73.867.238.043 dengan rincian sebagai berikut.

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Sertifikasi Lembaga	2.757.820.000	2.239.772.833	Lembaga	100	99	99,09
Sertifikasi Profesi dan SDM	73.785.360.000	70.052.398.999	Orang	114981	114178	98,85
Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria	1.781.400.000	1.575.066.211	NPSK	200	205	92,5

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Perpajakan

Pendapatan
Perpajakan
Rp 0

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0 persen. Hal tersebut disebabkan karena tidak terdapat pendapatan perpajakan pada satker Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara
Bukan Pajak Rp 0

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami dari tahun sebelumnya sebesar 0 persen. Hal tersebut disebabkan karena tidak terdapat pendapatan perpajakan pada satker Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

D.3 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp8.394.808.194

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.394.808.194 dan Rp8.029.686.854.

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai Tahun 2022 sebesar 4,55 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh Kenaikan Gaji Berkala Pegawai, pegawai yang sudah pensiun dan pegawai yang mutasi antar satker. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.300.140.120	2.287.447.560	0,55
Beban Pembulatan Gaji PNS	39.042	39.291	(0,63)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	142.568.812	130.037.746	9,64
Beban Tunj. Anak PNS	34.140.456	33.835.992	0,90
Beban Tunj. Struktural PNS	46.759.995	60.090.000	(22,18)
Beban Tunj. Fungsional PNS	145.044.000	163.014.000	(11,02)
Beban Tunj. PPh PNS	10.034.219	10.404.043	(3,55)
Beban Tunj. Beras PNS	114.278.760	114.713.280	(0,38)
Beban Uang Makan PNS	272.790.000	372.498.000	(26,77)
Beban Tunjangan Umum PNS	95.560.000	95.015.000	0,57
Beban Uang Lembur	4.901.000	0	0,00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2.441.670.140	2.303.794.942	5,98
Beban Uang Honor Tetap	2.786.881.650	2.458.797.000	13,34
Jumlah	8.394.808.194	8.029.686.854	4,55

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.773.707.890 dan Rp3.504.446.162.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 64,75 persen dibandingkan dengan Tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah pencetakan sertifikat kompetensi pada TA 2022. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Persediaan bahan baku	0	31.090.000	0,55
Beban Persediaan lainnya	0	5.000.000	(0,63)
Beban Persediaan konsumsi	5.773.707.890	3.468.356.162	9,64
Jumlah	5.773.707.890	3.504.446.162	4,55

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp58.111.401.916 dan Rp56.847.812.015.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,22 persen dibandingkan dengan Tahun 2021. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Keperluan Perkantoran	3.147.029.601	3.185.207.012	(1,20)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	263.000.000	261.854.000	0,44
Beban Bahan	36.434.265.656	35.830.628.230	1,68
Beban Honor Output Kegiatan	3.203.500.000	2.470.060.000	29,69
Beban Langganan Listrik	556.077.292	594.937.253	(6,53)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	417.600.000	342.255.312	22,01
Beban Jasa Pos dan Giro	0	478.308.572	(100,00)
Beban Jasa Konsultan	0	288.794.000	(100,00)
Beban Sewa	124.818.000	742.841.480	(83,20)
Beban Jasa Profesi	12.690.750.000	11.759.924.000	7,92
Beban Jasa Lainnya	433.856.720	302.252.500	43,54
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	150.245.550	483.929.156	(68,95)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	474.448.727	0	0,00
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	215.810.370	106.820.500	102,03
Jumlah	58.111.401.916	56.847.812.015	4,55

Beban Pemeliharaan
Rp1.658.741.132

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.658.741.132 dan Rp1.183.854.835.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk memepertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 40,11 persen dibandingkan dengan Tahun 2021. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	875.348.330	328.101.883	166,79
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	783.392.802	774.700.950	1,12
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	81.052.002	(100,00)
Jumlah	1.658.741.132	1.183.854.835	40,11

Beban Perjalanan
Dinas
Rp16.957.302.321

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp16.957.302.321 dan Rp11.961.103.282

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Perjalanan dinas Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 41,77 persen yang disebabkan oleh adanya Perjalanan Dinas Luar Negeri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	6.804.596.331	5.324.403.202	27,80
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.615.951.808	2.772.863.000	(5,66)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.357.557.299	983.610.000	343,02
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.472.287.882	2.880.227.080	(14,16)
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	706.909.001	0	0,00
Jumlah	16.957.302.321	11.961.103.282	41,77

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp3.988.459.088

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.988.459.088 dan Rp2.591.439.523.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.020.535.809	1.213.869.744	66,45
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.026.179.212	1.026.179.212	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	17.311.400	17.311.400	0,00
Beban Amortisasi Software	924.432.667	334.079.167	176,71
Jumah Penyusutan	3.988.459.088	2.591.439.523	53,91
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	3.988.459.088	2.591.439.523	(33,32)

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar
Rp150.501.733

D.9 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp150.501.733 dan Rp-131.085.063.

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	135.946.178	32.999.999,00	311,96
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	(164.085.062)	(100,00)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	14.555.555	-	-
Jumlah	150.501.733	(131.085.063)	(214,81)

Surplus (Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp941.235.893

D.10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp941.235.893 dan Rp552.268.851.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.500.198	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	843.110.195	336.970.500	150,20
Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	215.298.351	-
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	96.625.500	-	-
Jumlah	941.235.893	552.268.851	70,43

*Ekuitas Awal
Rp46.389.345.172*

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.46.389.345.172 dan Rp.43.762.918.453.

*Defisit LO Rp.-
91.628.883.225*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.-93.792.682.915 dan Rp.-83.697.158.883. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.-97.319.250 dan Rp.-247.189.720.

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp.0*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

D.11 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 Tahunan (Audited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	215.810.370	106.820.500,00	102,03
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	150.245.550	483.929.156	(68,95)
Jumlah	366.055.920	590.749.656	(38,04)

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.-693.750 dan Rp.23.590.280. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini adalah Koreksi atas Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges.

Semula akun 593121 (Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges) menjadi akun 521811 (Belanja barang persediaan barang konsumsi). Koreksi ini dilakukan karena akun tersebut tidak seharusnya dipakai pada Sekretariat BNSP. Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-693.750
Jumlah	-639.750

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.92.010.404.948 dan Rp.86.570.775.322. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2022

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	93.005.517.074
Diterima dari Entitas Lain	(995.112.126)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	92.010.404.948

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DKEL sebesar Rp 93.005.517.074, sedangkan DDEL sebesar Rp 995.112.126

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp44.509.747.955 dan Rp46.389.345.172

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1 Pengungkapan Lain-Lain

Penyalahgunaan dana pajak pada Sekretariat BSNP Ditjen Binalavotas Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebesar Rp. 6.387.973.217 (Rp. 4.522.828.520 + Rp. 1.865.144.697) dengan rincian progres tindak lanjut sebagai berikut:

Tahun 2020 sebesar Rp. 4.522.828.520

1. Sudah dibayar sebesar Rp. 664.100.00
2. Sisa pajak yang belum dibayarkan tahun 2020 sebesar Rp. 166.154.697

Tahun 2021 sebesar Rp. 1.865.144.697

1. Sudah dibayarkan sebesar Rp. 1.698.990.000
2. Sisa Pajak yang belum dibayarkan Tahun 2021 sebesar Rp. 166.154.697

Sehingga progres tindak lanjut penyetoran dan sisa pajak Sekretariat BNSP Ditjen Binalavotas adalah sebagai berikut:

1. Total pajak yang sudah dibayarkan untuk Tahun 2020 dan Tahun 2021

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (026) KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UNIT ORGANISASI : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (452533) SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 27/04/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 27/04/23 11:26 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	8,394,808,194	8,029,686,854	365,121,340	4.547
Beban Persediaan	5,773,707,890	3,504,446,162	2,269,261,728	64.754
Beban Barang dan Jasa	58,111,401,916	56,847,812,015	1,263,589,901	2.223
Beban Pemeliharaan	1,658,741,132	1,183,854,835	474,886,297	40.114
Beban Perjalanan Dinas	16,957,302,321	11,961,103,282	4,996,199,039	41.77
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (026) KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

UNIT ORGANISASI : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (452533) SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 27/04/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 27/04/23 11:26 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,988,459,088	2,591,439,523	1,397,019,565	53.909
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	94,884,420,541	84,118,342,671	10,766,077,870	12.799
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(94,884,420,541)	(84,118,342,671)	(10,766,077,870)	12.799
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	150,501,733	(131,085,063)	281,586,796	(214.81 2)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	150,501,733	32,999,999	117,501,734	356.066
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	164,085,062	(164,085,062)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	941,235,893	552,268,851	388,967,042	70.431
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	941,235,893	552,268,851	388,967,042	70.431
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,091,737,626	421,183,788	670,553,838	159.207
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(93,792,682,915)	(83,697,158,883)	(10,095,524,032)	12.062
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(93,792,682,915)	(83,697,158,883)	(10,095,524,032)	12.062

Keterangan :

FINAL

Jakarta Selatan, 27 April 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Sekretariat BNSP

Fauziah, S.E, M.Si

196412081986032001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (026) KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

UNIT ORGANISASI : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (452533) SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 27/04/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 27/04/23 11:26 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	46,389,345,172	43,762,918,453	2,626,426,719	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(93,792,682,915)	(83,697,158,883)	(10,095,524,032)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(97,319,250)	(247,189,720)	149,870,470	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(96,625,500)	(270,780,000)	174,154,500	-
LAIN-LAIN	(693,750)	23,590,280	(24,284,030)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	92,010,404,948	86,570,775,322	5,439,629,626	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,879,597,217)	2,626,426,719	(4,506,023,936)	-
EKUITAS AKHIR	44,509,747,955	46,389,345,172	(1,879,597,217)	-

Keterangan :

FINAL

Jakarta Selatan, 27 April 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Sekretariat BNSP

Fauziah, S.E, M.Si

196412081986032001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 026
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS 13
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI 452533



Tgl Data : 27/04/23 6:00 AM
 Tgl Cetak : 27/04/23 11:26 AM
 Halaman : 2
 lep_lra_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2022			2021		
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	98,838,500,000	93,005,517,074	5,832,982,926	86,911,383,000	86,004,829,886	906,553,114
C	PEMBIAYAAN						99

Keterangan :
FINAL

Jakarta Selatan, 27 April 2023
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kepala Sekretariat BNSP

Fauziah, S.E, M.Si
 196412081986032001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (026) KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

UNIT ORGANISASI : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (452533) SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 27/04/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 27/04/23 11:26 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	247,910,823	0	247,910,823	0.00
Persediaan	399,801,527	1,056,648,236	(656,846,709)	(62.16)
JUMLAH ASET LANCAR	647,712,350	1,056,648,236	(408,935,886)	(38.70)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	15,257,733,873	13,672,732,293	1,585,001,580	11.59
Gedung dan Bangunan	38,333,391,500	38,333,391,500	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	692,456,000	692,456,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(10,931,028,028)	(7,867,001,607)	(3,064,026,421)	38.95
JUMLAH ASET TETAP	43,352,553,345	44,831,578,186	(1,479,024,841)	(3.30)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	2,386,857,000	1,206,150,000	1,180,707,000	97.89
Aset Lain-lain	1,620,552,540	1,918,751,540	(298,199,000)	(15.54)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3,250,016,457)	(2,623,782,790)	(626,233,667)	23.87
JUMLAH ASET LAINNYA	757,393,083	501,118,750	256,274,333	51.14
JUMLAH ASET	44,757,658,778	46,389,345,172	(1,631,686,394)	(3.52)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang Muka dari KPPN	247,910,823	0	247,910,823	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	247,910,823	0	247,910,823	
JUMLAH KEWAJIBAN	247,910,823	0	247,910,823	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	44,509,747,955	46,389,345,172	(1,879,597,217)	(4.05)
JUMLAH EKUITAS	44,509,747,955	46,389,345,172	(1,879,597,217)	(4.05)
JUMLAH EKUITAS	44,509,747,955	46,389,345,172	(1,879,597,217)	(4.05)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	44,757,658,778	46,389,345,172	(1,631,686,394)	(3.52)

Keterangan :

FINAL

Jakarta Selatan, 27 April 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Sekretariat BNSP

Fauziah, S.E, M.Si
196412081986032001



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 452533
SAMPAI DENGAN PERIODE 2022-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	98,838,500,000	98,838,500,000	0
2	Belanja	93,005,519,544	93,005,519,544	0
3	Pengembalian Belanja	-2,470	-2,470	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	995,112,126	995,112,126	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	247,910,823	247,910,823	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	247,910,823	247,910,823	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JAN-23

